Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

IMPLIKASI JARINGAN TRANSNASIONAL SENJATA ILEGAL TERHADAP KRISIS KEAMANAN MANUSIA (*HUMAN SECURITY*) DI KAWASAN TANDUK AFRIKA

Nur Halima Muhamad

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available online Juni , 2025

nurhalimamuh@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini mengelaborasi dampak signifikan dari jaringan transnasional penyelundupan senjata ilegal terhadap keamanan manusia di Kawasan Tanduk Afrika. Meskipun ada kerangka hukum regional yang bertujuan mengurangi perdagangan senjata ringan dan kecil (SALW), perdagangan ilegal senjata tetap menjadi faktor yang memperburuk konflik, memperbesar penderitaan manusia, dan menghambat upaya perdamaian. Proliferasi senjata ilegal merusak baik **keamanan pribadi** maupun **keamanan ekonomi** individu, seperti yang terlihat dalam eskalasi kekerasan dan pengungsian di negara-negara seperti Somalia, Ethiopia, dan Sudan. Melalui analisis kualitatif berbasis pustaka, penelitian ini menyoroti bagaimana jaringan kriminal transnasional mengeksploitasi kelemahan pengawasan negara untuk melanggengkan kekerasan dan ketidakamanan. Artikel ini juga menggunakan **kerangka Keamanan Manusia UNDP** untuk mengungkap bagaimana perdagangan senjata ilegal merusak **kebebasan dari rasa takut** dan **kebebasan dari keterbatasan atas kebutuhan**. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama regional dan internasional serta reformasi hukum yang lebih ketat untuk mengatasi akar masalah ketidakamanan di kawasan ini.

Kata Kunci: Human, security, Jaringan Transnasional. Senjata Ilegal

A B S T R A C T

The Horn of Africa is one of the most conflict-prone regions in the world, where transnational illicit arms trafficking networks are a major factor exacerbating the human security crisis. This study analyzes how arms smuggling via maritime routes into the Horn of Africa strengthens non-state armed groups such as al-Shabaab and the Islamic State of Somalia, and its far-reaching impacts across seven dimensions of human security, ranging from increased violence, mass displacement, infrastructure damage, to economic, food, health, and environmental vulnerabilities. The study employs a qualitative approach using literature review and thematic analysis methods, identifying that the failure of regional legal frameworks and weak governance in the region exacerbate the arms smuggling networks exploited during the escalation of conflicts in the region. This, in turn, has significant implications for human security dimensions.

Keywords: **Human, security, transnational network. Illicit arms**

1. PENDAHULUAN

Kawasan Tanduk Afrika merupakan salah satu wilayah yang paling rawan konflik di dunia. Negara-negara di kawasan ini telah lama dilanda perang dan konflik berkepanjangan. Ironinya, warga sipil yang menanggung beban utama konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan

*Corresponding author
E-mail addresses: nurhalimamuh@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

kelompok bersenjata oposisi. situasi keamanan di Tanduk Afrika sangat tidak stabil. Contoh konflik dengan skala yang cukup besar adalah pertempuran antara tentara dan pasukan paramiliter di Sudan yang menyebabkan jutaan orang mengungsi. Selain itu, konflik internal di Ethiopia yakni perang sipil yang sampai hari ini masih berkobar, serta Somalia yang belum memiliki pemerintahan berfungsi penuh selama puluhan tahun dan menghadapi perang melawan kelompok teroris seperti al-Shabaab (Reuters, 2024). Konflik-konflik ini mmengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas oleh pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata. Menurut laporan Human Rights Watch menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkonflik di Sudan dan Ethiopia menewaskan dan melukai ribuan penduduk sipil, memaksa 12 juta orang mengungsi di Sudan serta menyebabkan kerusakan dan kehancuran infrastruktur yang cukup besar (Human Right Watch, 2025).

Dalam konteks krisis ini, Jaringan transnasional penyelundupan small arms and light weapons (SALW) atau senjata ringan ilegal menjadi salah satu faktor utama yang memperparah krisis keamanan manusia (*human* security) di wilayah tersebut. senjata ilegal di Kawasan Tanduk Afrika telah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk krisis keamanan manusia (human security) di wilayah tersebut. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan senjata ilegal yang paling aktif di Afrika, dengan aliran senjata yang berasal dari berbagai negara seperti Iran dan Yaman, yang diselundupkan melalui jalur maritim menuju Somalia dan negara-negara tetangga seperti Ethiopia, Kenya, dan Mozambik (ADF, 2023). Laporan dari ISS Africa (2023) menunjukkan bahwa penyelundupan senjata dari Yaman dan Iran ke Somalia telah memperkuat kelompok ekstremis seperti al-Shabaab dan Islamic State di Somalia (Willima & Ramachela, 2023) (Willima & Ramachela, 2023). Ketersediaan distribusi SALW yang tidak terkendali ini menyebabkan eskalasi kekerasan, memicu ketidakamanan, penurunan ekonomi, dan ketidakstabilan politik yang pada alhirnya merusak upaya penegakan hukum serta perdamaian kawasan.

Ironisnya, krisis ini bersifat paradoks dimana meskipun telah ada undang-undang dan inisiatif pengendalian senjata di tingkat regional dan sub-regional selama beberapa dekade, seperti Deklarasi Bamako tahun 2000 dan Protokol Nairobi tahun 2000, yang bertujuan untuk mengurangi perdagangan senjata dan menegakkan kontrol yang lebih ketat, namun tidak menghalangi senjata mencapai jaringan kriminal, pemberontak, dan bahkan milisi yang didukung pemerintah (Muhammed, 2025). (Muhammed, 2025). Krisis yang dipicu dan diperburuk oleh jaringan transnasional senjata ilegal ini memiliki implikasi mendalam terhadap keamanan manusia (human security). Berbeda dengan keamanan tradisional yang berpusat pada negara, keamanan manusia berorientasi pada perlindungan individu sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari berbagai ancaman. Konsep ini menekankan kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) dan kebebasan dari keterbatasan atas kebutuhan (freedom from want) (Burhanuddin, 2017). Maraknya peredaran senjata ilegal secara fundamental mengancam kedua pilar ini. Senjata ilegal secara langsung memicu rasa takut melalui konflik bersenjata, kekerasan, dan impunitas yang meluas, sementara secara tidak langsung memperburuk keterbatasan atas kebutuhan dengan memperparah kondisi kemanusiaan, menghambat akses terhadap bantuan, dan menyebabkan kerawanan pangan dan kekurangan gizi.

Mengingat situasi di Kawasan ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana jaringan transnasional senjata ilegal secara spesifik berkontribusi terhadap krisis keamanan manusia di kawasan Tanduk Afrika? Hal penting lain yang perlu dianalisis adalah dimensi transnasional dari peredaran senjata di Kawasan ini yang melanggengkan konflik dan lebih jauh berdampak pada krisis *human security* yang lebih luas. Maka dari itu pemahaman yang komprehensif memerlukan perspektif regional yang melihat saling keterkaitan (mutual vulnerability) antara berbagai ancaman keamanan di kawasan ini, di mana konflik internal dengan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

cepat mengambil dimensi regional akibat banyaknya aktor bersenjata dan persaingan antarnegara.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang korelasi antara perdagangan senjata ilegal dan keamanan manusia di kawasan tanduk afrika seperti *oleh Bile (2024)* dengan judul *The Challenges of Human Security in the Horn of Africa: The Case of Somaliland* mengkaji keamanan manusia di Somaliland menggunakan tujuh dimensi keamanan UNDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Somaliland telah mencapai kemajuan dalam keamanan politik, ekonomi, kesehatan, personal, dan komunitas sejak 1991. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama: ketidakamanan lingkungan dan krisis pangan kronis yang disebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah dan bencana alam berulang. Meskipun mengidentifikasi proliferasi senjata ringan sebagai ancaman utama keamanan komunitas, penelitian ini tidak menganalisis mekanisme jaringan transnasional yang memfasilitasi peredaran senjata tersebut. Penelitian lain dilakukan oleh Aning, & Lartey (2019) yang berjudul *Governance Perspectives of Human Security in Africa* yang berargumen bahwa keamanan manusia di Afrika tidak dapat dicapai tanpa tata kelola demokratis yang akuntabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur keamanan di banyak negara Afrika masih mencerminkan sistem otoritarian warisan pascakemerdekaan. Meskipun memberikan kerangka teoretis yang kuat tentang hubungan tata kelola dan keamanan manusia, penelitian ini tidak secara khusus menganalisis dampak jaringan senjata ilegal lintas negara terhadap keamanan manusia. Solomon, N., et al. (2018) juga menulis *Environmental Impacts and Causes of Conflict in the Horn of Africa: A Review*. Mereka mengkaji dampak lingkungan dari konflik di Tanduk Afrika sejak 1970 serta peran variabilitas iklim dalam memperburuk dampak konflik. Penelitian mengidentifikasi lima penyebab utama konflik: keluhan masyarakat, perilaku pemerintah yang buruk, kelangkaan sumber daya, konflik lintas batas, dan variabilitas iklim.

Penelitian selanjutnya yang sejalan dengan topik yakni oleh Gobena, (2020) dengan judul *Transnational Organized Crime and Peacebuilding in East Africa*. Gobena mengkaji hubungan antara kejahatan terorganisir transnasional, konflik, dan pembangunan perdamaian di Afrika Timur dengan fokus pada Etiopia, Kenya, dan Somalia. Penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan terorganisir termasuk kekerasan terorganisir, kejahatan finansial, perdagangan narkoba dan manusia, pembajakan, dan kejahatan siber. Setiap negara menghadapi tantangan spesifik: Etiopia dengan penyelundupan senjata, Kenya dengan perdagangan narkoba, dan Somalia dengan perdagangan ilegal gula dan arang oleh al-Shabaab. Namun, analisis terbatas pada kasus per negara dan tidak mengintegrasikan dampak terhadap keamanan manusia secara menyeluruh.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, analisis tentang TOC dan human security dilakukan secara terpisah atau fokus pada *single-country cases* atau minim akan analisis secara regional. Sehingga masih terdapat celah penelitian untuk memahami bagaimana jaringan kejahatan terorganisir transnasional secara sistemik mempengaruhi keamanan manusia di kawasan Tanduk Afrika.

Human Security

Konsep keamanan manusia (human security) secara mendasar adalah sebuah gagasan yang mengalihkan fokus keamanan dari negara ke individu dan komunitas, (Bile, 2025). Konsep keamanan manusia dipopulerkan secara luas oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994 (Singh, 2016). Munculnya konsep ini didorong oleh berakhirnya Perang Dingin dan semakin cepatnya globalisasi, yang memperlihatkan bahwa meskipun ada stabilitas tingkat makro, individu tetap tidak aman dari berbagai ancaman non-militer seperti sisa-sisa perang, bencana lingkungan, kemiskinan, penyakit, kelaparan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Singh, 2016). Konsep ini juga mengakui bahwa pemerintah, yang seharusnya menjadi penyedia keamanan fundamental, terkadang justru gagal dalam kewajibannya atau bahkan menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri, terutama dalam kasus negara yang represif atau gagal (Singh, 2016).

Meskipun tidak ada definisi universal yang tunggal, ada konsensus bahwa keamanan manusia harus fokus pada individu dan kebebasan mereka dari berbagai ancaman dan tekanan(Hidayat, 2017). Karakteristik dari keamanan manusia adalah sifatnya yang universal, komponen-komponennya saling bergantung, mudah dijamin melalui pencegahan dini, dan berpusat pada manusia (people-centered)(Bile, 2024). UNDP (1994) mengidentifikasi dua aspek utama dari keamanan manusia yakni kebebasan dari kebutuhan (freedom from want) dan kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) (Burhanuddin, 2017):

a. Kebebasan dari kebutuhan (freedom from want): Mengacu pada perlindungan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan (Singh, 2016). Ini berarti kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup mereka (Burhanuddin, 2017).
b. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear): Melibatkan perlindungan dari gangguan mendadak dan merusak dalam pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan, atau komunitas (Singh, 2016). Ini berarti melindungi individu dari kekerasan fisik maupun non fisik, konflik bersenjata, kejahatan, terorisme, dan bentuk-bentuk ancaman langsung lainnya terhadap keselamatan mereka.

Ruang Lingkup dan Aspek Keamanan Manusia Konsep keamanan manusia mencakup berbagai dimensi yang luas dan saling terkait bahkan potensial terjadi efek domino diantara kemungkinan ancamannya (Burhanuddin, 2017). Dalam UNDP, *Human Developent Report* 1994 (Singh, 2016). menjabarkan dimensi keamanan manusia terdiri dari:

1) Keamanan Ekonomi (Economic Security): Pemenuhan kebutuhan dasar individu, baik melalui pekerjaan yang menghasilkan pendapatan maupun dari Jaminan Perlindungan Sosial. serta bebas dari kemiskinan.
2) Keamanan Pangan (Food Security): Terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi, memastikan pola makan sehat, memastikan ketersediaan hak atas pangan terutama bagi kelompok rentan.
3) Keamanan Kesehatan (Health Security): Perlindungan dari penyakit menular, malnutrisi, dan akses ke layanan kesehatan.
4) Keamanan Lingkungan (Environmental Security): berarti kelestarian air bersih, udara segar, dan tanah subur, serta termasuk bebas dari deforestasi dan bencana alam.
5) Keamanan Personal (Personal Security): Perlindungan dari kekerasan fisik, kriminalitas, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah pribadi seperti bunuh diri.
6) Keamanan Komunitas (Community Security): Hak atas kebebasan identitas (ras, bahasa, kasta, kelas, etnisitas, gender, generasi, agama, kebangsaan, dll) dan perlindungan dari ketegangan atau konflik antar identitas.
7) Keamanan Politik (Political Security): Kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan berkumpul, serta bebas dari represi pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia sistematis. Hal ini juga meliputi kebebasan dari tindakan represi pemerintah, pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, dan militerisasi.

(Singh, 2016)

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Terdapat dua pendekatan human security yaitu Pendekatan maksimalis (luas) dan Pendekatan minimalis (sempit) (Burhanuddin, 2017). Pendekatan Maksimalis (Luas) adalah pendekatan komprehensif yang mencakup pembangunan, hak asasi manusia, lingkungan, dan isu keamanan tradisional. Ini menggabungkan "kebebasan dari kebutuhan" dan "kebebasan dari rasa takut". Sebaliknya, pendekatan minimalis (sempit) berargumen bahwa keamanan manusia harus fokus pada ketiadaan ancaman fisik dan "kebebasan dari rasa takut" saja. Para pendukung pendekatan ini khawatir bahwa definisi yang terlalu luas akan membuat konsep keamanan manusia menjadi "daftar belanja ancaman" yang tidak efektif atau "tidak berarti dan tidak berguna secara analitis" (Burhanuddin, 2017). Secara substansial, keamanan manusia berupaya menyediakan kerangka kerja multidimensi untuk melindungi dan memberdayakan individu dari berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, dengan menekankan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi (Burhanuddin, 2017). Ini bukan sekadar wacana etis, tetapi juga utilitarian untuk kelangsungan hidup umat manusia di hadapan berbagai tantangan global (Singh, 2016).

Dalam konteks Tanduk Afrika, peredaran jaringan transnasional senjata ilegal secara teoritis menjadi pemicu dan memperparah ancaman terhadap kedua pilar keamanan manusia tersebut. Ancaman terhadap "kebebasan dari rasa takut" menjadi sangat nyata dengan eskalasi kekerasan komunal, proliferasi senjata ringan, dan aktivitas terorisme yang menyebabkan krisis keamanan pribadi dan komunitas di wilayah tersebut, sejalan dengan karakteristik "perang-perang baru" (new wars) yang lebih banyak melibatkan aktor non-negara dan menargetkan warga sipil (Aning & Lartrey, 2019). Pada saat yang sama, ancaman terhadap "kebebasan dari kebutuhan" juga diperburuk karena konflik dan ketidakstabilan akibat senjata ilegal mengalihkan sumber daya dari pembangunan, memperburuk kemiskinan kronis, kerawanan pangan, masalah kesehatan, dan degradasi lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut (Bile, 2024). Dengan demikian, artikel ini menggunakan lensa keamanan manusia yang multidimensional untuk menyoroti bahwa ancaman transnasional seperti perdagangan senjata ilegal memiliki implikasi yang luas dan saling terkait terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan martabat individu di Tanduk Afrika, terutama ketika institusi negara lemah atau bahkan menjadi bagian dari masalah.

Tansnational Organized Crime

Transnational Organized Crime (TOC) adalah fenomena internasional yang kompleks dengan dampak besar pada keamanan, politik, perdagangan, dan hak asasi manusia global (Zabyelina, 2009). Pendekatan pasca-internasional mengkonseptualisasikan TOC pada tingkat yang mencerminkan logika baru sistem internasional, yaitu struktur transnasional organisasi kriminal yang melintasi waktu, ruang fisik, dan virtual, difasilitasi oleh peningkatan perdagangan internasional, revolusi informasi dan komunikasi, serta sistem keuangan global (Zabyelina, n.d). TOC dicirikan oleh lima elemen intrinsik: pelaku yang melintasi batas, produk (barang atau jasa ilegal), orang (migran ilegal atau korban perdagangan manusia), hasil (keuntungan dari aktivitas ilegal), dan sinyal digital (misalnya, kejahatan siber) (Zabyelina, n.d).

Di kawasan Tanduk Afrika (East Africa), TOC merupakan ancaman serius, khususnya di negara-negara yang rapuh dan terdampak konflik seperti Ethiopia, Kenya, dan Somalia (Gobena, 2020). Salah satu bentuk TOC yang paling menonjol di wilayah ini adalah penyelundupan senjata ilegal, khususnya senjata ringan dan senjata kecil (SALW) (Gobena, 2020). Ethiopia, misalnya, sangat tertantang oleh penyelundupan SALW24. Senjata-senjata ini diselundupkan ke Ethiopia melalui Djibouti dan Sudan, bahkan berasal dari pelabuhan seperti Mersin di Turki26. Penyelundupan senjata ilegal ini memiliki hubungan erat dengan rivalitas etnis, retorika yang beracun dari "pengusaha etnis", ketidakamanan masyarakat, budaya senjata yang sudah ada,

perbatasan yang keropos, dan lemahnya langkah-langkah kontrol senjata (Gobena, 2020). Jaringan kriminal ini merusak pembangunan negara, keamanan manusia, dan pembangunan ekonomi dengan merusak proses perdamaian, mengacaukan ekonomi nasional, dan mengintensifkan konflik etnis (Gobena, 2020).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi Pustaka). Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan banyak domain serta sub-domain lainnya (Alam, M. S., & Asmawi, 2024). Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki dan memahami makna, pola, dan nuansa yang mendasari pengalaman, tindakan, dan peristiwa manusia (Alam, M. S., & Asmawi, 2024). Penelitian kualitatif menekankan pengumpulan data non-numerik (deskriptif) seperti kata-kata, gambar, dan observasi, untuk memperoleh wawasan tentang kompleksitas isu yang sedang diteliti lainnya (Alam & Asmawi, 2024). Dalam konteks penelitian kualitatif ini, pendekatan *library research* atau studi pustaka adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan rekonstruksi data dari berbagai sumber tertulis atau pustaka yang sudah ada (Andlini, M.N. et al, 2021). Pendekatan ini melibatkan pencarian sumber dan rekonstruksi informasi dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya (Andlini, M.N. et al, 2021). Dengan menggunakan metode peneitian kualitatif dengan pendekatan *library research*, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hubungan antara jaringan transnasional senjata ilegal dengan *human security crisis* di Kawasan Tanduk Afrika dengan berfokus pada pengumpulan, sintesis, dan rekonstruksi data dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan investigasi dari organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga *think-tank*, artikel berita internasional, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga regional maupun internasional.

Dalam menganalisis topik ini, akan digunakan pendekatan tinjauan semi-sistematis, dengan analis data menggunakan analisis tematik (thematic analysis) atau analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola dalam bentuk tema dari teks-teks yang dikumpulkan (Snyder, 2019*)*. Untuk memastikan temuan yang kredibel dan bermakna, analisis tematik harus dilakukan secara sistematis, dengan dokumentasi cermat atas keputusan interpretatif yang mendalam *(with careful documentation of interpretive decisions)* dan keterlibatan dengan data melampaui deskripsi tingkat permukaan data (Ahmed et al, 2025). Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik akan digunakan untuk mengungkap pola-pola kompleks dalam data yang berkaitan dengan dampak jaringan transnasional senjata ilegal terhadap krisis keamanan manusia dengan mengikuti kerangka kerja sistematis enam fase yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (Ahmed et al, 2025), untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini akan dijalankan sebagai berikut:

1. Fase Familiarisasi Data: Peneliti akan membaca dan mendalami seluruh korpus data untuk membangun pemahaman awal yang mendalam. Fokus pada tahap ini adalah untuk mengenali pola-pola awal yang berulang, seperti rute-rute penyelundupan yang sering disebut, aktor-aktor kunci (negara dan non-negara) yang dominan, serta jenis dampak kemanusiaan yang paling sering dilaporkan dalam sumber-sumber tersebut.
2. Fase Pembuatan Kode Awal: Segmen-segmen data yang relevan akan diberi label (kode) secara sistematis untuk mereduksi kompleksitas data. Kode-kode ini tidak hanya akan mencakup berbagai dimensi keamanan manusia (misalnya, keamanan pangan terganggu, pengungsian paksa), tetapi juga kode aktor (contoh: al-Shabaab, militer Ethiopia,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

penyelundup lokal), kode mekanisme (contoh: korupsi pelabuhan, penyerangan gudang senjata), dan kode intervensi (contoh: kegagalan patroli, sanksi PBB).

3. Fase Pencarian Tema: Kode-kode yang serupa akan dikelompokkan ke dalam kandidat tema yang lebih luas. Pada tahap ini, peneliti akan mencari hubungan dan pola yang lebih besar, misalnya tema potensial seperti "Keterlibatan Aktor Negara dalam Pasar Gelap Senjata", "Dampak Asimetris Senjata Ilegal terhadap Perempuan dan Anak", atau "Paradoks Kebijakan: Kegagalan Inisiatif Pengendalian Senjata Regional".
4. Fase Peninjauan Tema: Setiap kandidat tema akan dievaluasi untuk memastikan koherensi internal (data di dalam tema harus saling terkait) dan perbedaan eksternal (setiap tema harus berbeda satu sama lain), sehingga membentuk sebuah narasi yang logis dan koheren.
5. Fase Pendefinisian dan Penamaan Tema: Esensi dari setiap tema yang telah valid akan disempurnakan. Setiap tema akan diberi nama yang jelas dan ringkas, serta didukung oleh kutipan data yang paling representatif dari sumber yang dianalisis.
6. Fase Penulisan Laporan: Tahap terakhir adalah menyusun temuan-temuan ke dalam sebuah narasi analitis yang koheren, di mana setiap tema diuraikan dan dihubungkan kembali dengan pertanyaan penelitian utama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Geopolitik Kawasan

Tanduk Afrika merupakan salah satu wilayah yang paling signifikan secara geopolitik namun tidak stabil di dunia, berlokasi strategis di persimpangan rute perdagangan global yang penting, menghubungkan Timur Tengah ke Sub-Sahara Afrika dan mencakup negara-negara seperti Ethiopia, Somalia, Kenya, Sudan, Eritrea, dan Djibouti (Dubale, 2024). Keberadaannya di samping salah satu koridor pelayaran terpenting di dunia, Selat Bab al Mandab, dan dekat dengan Semenanjung Arab yang kaya minyak serta Sudan Selatan, menjadikannya salah satu wilayah paling kritis di dunia dalam hal keamanan (Gebremichael, 2019).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar 1. ***Horn of Africa Map*** **(***Source:* https://www.worldatlas.com)

Kawasan Tanduk Afrika telah lama dilanda konflik dan ketidakstabilan yang mendalam. Akar dari banyak tantangan keamanan saat ini dapat ditelusuri kembali ke warisan kolonialisme, di mana batas-batas negara ditetapkan secara artifisial tanpa mempertimbangkan realitas etnis, budaya, atau politik yang ada (Dubale, 2024). Pembagian kelompok etnis seperti Afar antara Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti oleh arsitektur geopolitik kolonial Prancis dan Italia, atau delimitasi perbatasan yang bias dan tidak jelas di Somalia oleh kekuatan kolonial, telah membuka jalan bagi konflik yang berkepanjangan (Tabar et al, 2021). Perselisihan perbatasan antara Eritrea dan Ethiopia, misalnya, sebagian besar disebabkan oleh ambiguitas dalam perjanjian perbatasan yang ditandatangani di era kekaisaran kolonial Italia (Tabar et al, 2021). Konflik-konflik besar di kawasan ini meliputi perang saudara di Somalia yang dimulai pada awal tahun 1990-an dan terus berlanjut, perang Eritrea-Ethiopia (1998-2008) (Gebremichael, 2019). Perang di Darfur dan Perang Saudara Sudan Kedua juga merupakan bagian dari sejarah konflik yang panjang di Sudan (Salomon et al, 2018).

Penyebab konflik sangat kompleks dan berlapis. Kemiskinan ekstrem, kelangkaan sumber daya, pemerintahan otoriter, dan lemahnya organisasi masyarakat sipil adalah beberapa faktor internal yang berkontribusi. Ancaman utama adalah radikalisme kekerasan yang didorong oleh keyakinan agama ekstrem,pengangguran dan marginalisasi sebagai pemicu radikalisme kekerasan dan jaringan teroris internasional, serta ketidakamanan maritim (Gebremichael, 2019). Kelangkaan sumber daya seperti air dan lahan subur seringkali memicu konflik antarkelompok dan bahkan transnasional (Gebremichael, 2019). Selain itu, tingkat pertumbuhan populasi yang cepat di Tanduk Afrika (sekitar 3% per tahun) menekan layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan berpotensi memperburuk ketidakpuasan yang memicu konflik (Gebremichael, 2019).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Konflik internal yang sedang berlangsung, seperti perang saudara di Somalia, konflik Tigray di Ethiopia, dan krisis di Sudan, tidak hanya mengacaukan negara-negara tersebut tetapi juga menciptakan tantangan keamanan regional, seringkali menyeret negara-negara tetangga ke dalam perselisihan ini (Dubale, 2024). Misalnya, ketidakstabilan di Somalia berdampak pada Kenya dan Ethiopia melalui jalur pengungsi, terorisme, dan perang proksi regional (Dubale, 2024).

Berikut adalah beberapa aktor regional utama dan dinamikanya:

1) Ethiopia; Bangkit sebagai kekuatan regional dan terlibat dalam misi penjaga perdamaian, namun, juga menghadapi tantangan internal seperti konflik Tigray dan ketegangan etnis (Dubale, 2024).Upaya Ethiopia untuk mendapatkan akses ke pelabuhan laut, seperti penandatanganan MoU dengan Somaliland pada Januari 2024 untuk akses ke Pelabuhan Berbera, telah menyebabkan ketegangan besar dengan Somalia, yang memandangnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorialnya (Alketbi, 2024). Ethiopia juga memiliki perselisihan yang belum terselesaikan dengan Mesir dan Sudan terkait pemanfaatan Sungai Nil (Munene 2023).
2) Somalia: Merupakan pusat kelompok teroris domestik seperti Al-Shabaab. Al-Shabaab telah berkembang menjadi aktor politik paling kejam di Tanduk Afrika dan bahkan dianggap sebagai pemerintah alternatif tidak resmi (Munene 2023). Somalia juga terlibat dalam konfrontasi perbatasan maritim dengan Kenya (Munene 2023).
3) Sudan dan Sudan Selatan: Kedua negara ini memiliki kepentingan di Sungai Nil tetapi juga menghadapi tantangan internal yang serius, terutama masalah stabilitas pemerintahan yang kurang diterima oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas etnis yang bersaing (Munene 2023). Konflik yang sedang berlangsung di Sudan antara tentara dan Pthe Rapid Support Force (RSF) telah meluas dan menarik aktor regional dan internasional.
4) Eritrea: Terletak di Laut Merah, Eritrea memiliki hubungan dengan Al-Shabaab dan berusaha menjadi kekuatan regional dengan mengatur Somalia dan Ethiopia (Munene 2023). Namun, juga dikenal tidak kooperatif dalam masalah keamanan maupun dalam Otoritas Antarpemerintah tentang Pembangunan (Intergovernmental Authority on Development/IGAD).
5) Djibouti: Meskipun kecil,Djibouti adalah markas besar IGAD. Lokasinya yang geostrategis di titik pertemuan maritim Laut Merah dan Samudra Hindia menarik kekuatan eksternal untuk mendirikan instalasi militer yang bersaing (Munene 2023).
6) Kenya: Kenya berkomitmen untuk membantu menstabilkan Somalia dan Sudan Selatan, namun seringkali terjebak dalam perselisihan faksi dan dituduh memanfaatkan kelemahan internal tetangganya (Munene 2023). Kenya Seringkali menjadi tempat pengungsian bagi mereka yang melarikan diri dari konflik di negara-negara tetangga.
   Organisasi Regional (AU dan IGAD): Uni Afrika (AU) dan Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) telah memainkan peran krusial dalam mediasi konflik dan operasi penjaga perdamaian di Tanduk Afrika (Dubale, 2024). IGAD, yang didirikan pada tahun 1996 dan berpusat di Djibouti, bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan regional (Munene 2023). Namun, upaya mereka seringkali terhambat oleh divisi politik

internal dan tekanan eksternal, serta kepentingan yang bervariasi dari negara-negara anggotanya, seperti persaingan antara Ethiopia dan Kenya atas pengaruh regional (Dubale, 2024).

Tanduk Afrika telah menjadi arena persaingan yang intens bagi banyak kekuatan global yang berupaya mengeksploitasi sumber daya, mempertahankan pengaruh, dan menjamin rute perdagangan vital dengan intervensi mereka sering kali memperburuk lanskap kejahatan transnasional yang ada (Gebremichael, 2019). Amerika Serikat (AS) secara historis memandang kawasan ini terutama melalui lensa kontraterorisme, khususnya terkait dengan kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab, dan berupaya membatasi pengaruh Tiongko yang telah meningkatkan pengaruhnya secara pesat, terutama melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan mendirikan pangkalan militer asing pertamanya di Djibouti untuk melindungi kepentingan ekonominya yang besar di kawasan tersebut (Dubale, 2024). Sementara itu, negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), telah meningkatkan keterlibatan mereka melalui dukungan finansial, bantuan kemanusiaan, dan investasi ekonomi, juga nyatanya seringkali terlibat dalam *proxy war* yang berdampak langsung pada Eritrea, Somalia, dan Djibouti, dan memperdala perpecahan politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok criminal (Dubale, 2024). Iran berupaya bersaing dengan Arab Saudi melalui Foreign Direct Investment (FDI) di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya, serta melalui jaringan komunitas Syiah Lebanon yang terlibat dalam perdagangan intan untuk mendanai kelompok-kelompok tertentu. Intervensi eksternal ini, meskipun kadang membawa investasi ekonomi dan bantuan militer, seringkali memperburuk konflik lokal dan menyebabkan penguatan struktur kekuasaan yang tidak stabil (Dubale, 2024).

Secara regional, Ethiopia sebagai kekuatan militer dominan terlibat dalam stabilisasi Somalia dan mencegah spillover al-Shabaab, sementara negara Teluk (Arab Saudi, UEA), Turki, China, Rusia, dan AS bersaing mengamankan jalur perdagangan dan pangkalan militer di Bab al-Mandeb (Aidi, 2020). Blok regional baru "Horn of Africa Cooperation" yang diusulkan Eritrea–Ethiopia–Somalia menghadapi potensi marginalisasi IGAD dan AU, sedangkan proyek pelabuhan Ethiopia–Somaliland tahun 2024 menambah dimensi kedaulatan infrastruktur (Policy Center for the New South, 2020).

Tren Penyelundupan senjata Ilegal di Kawasan Tanduk Afrika

Tren penyelundupan senjata di Afrika secara keseluruhan memberikan konteks penting untuk memahami dinamika di Kawasan Tanduk Afrika. Berdasarkan data UNODC, senjata api ringan dan senjata kecil (SALW) mendominasi proporsi senjata yang disita di seluruh Afrika. Shotgun merupakan jenis senjata yang paling banyak disita, mencakup 38% dari total, diikuti oleh pistol (28%) dan senapan (22%) (UNODC, 2020). Senapan mesin ringan, revolver, dan senapan mesin menyumbang persentase yang lebih kecil (UNODC, 2020). Distribusi umum ini memberikan gambaran dasar tentang komposisi aliran senjata ilegal di benua tersebut.

Jenis Senjata	Persentase dari Total Senjata yang Disita

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Shotgun	38%
Pistol	28%
Senapan	22%
Senapan Mesin Ringan	8%
Revolver	2%
Senapan Mesin	2%
SALW Lainnya	0%
Senjata Api/SALW	68%
Senjata Lain yang Tidak Terklasifikasi	32%

Tabel 1: Distribusi Rata-rata Senjata yang Disita di Afrika berdasarkan Jenis (2016-2017)
Sumber: UNODC Global Study on Firearms Trafficking 2020(https://www.unodc.org)

. Kenya, sebagai negara kunci dalam konteks Tanduk Afrika yang lebih luas, melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah senjata yang disita, dari 5.264 unit pada tahun 2016 menjadi 9.728 unit pada tahun 2017(UNODC, 2020). Peningkatan ini mencakup kenaikan yang mencolok pada penyitaan senapan dan shotgun. Demikian pula, Sudan juga mengalami peningkatan jumlah senjata yang disita, dari 998 unit pada tahun 2016 menjadi 1.361 unit pada tahun 2017 , dengan pistol dan senapan menjadi jenis yang paling umum (UNODC, 2020). Data UNODC juga menunjukkan bahwa negara-negara di Afrika dengan tingkat kematian akibat kekerasan dan pembunuhan yang lebih tinggi cenderung menyita persentase senjata api yang lebih tinggi yang terkait dengan kejahatan kekerasan (UNODC, 2020).

Negara	Tahun	Senapan Mesin	Pistol	Revolver	Senapan	Shotgun	Senapan Mesin	Lainnya	Tidak Diketahu	Total
Kenya	2016	31	769	156	3699	63	94	281	424	5264
Kenya	2017	51	738	840	5720	2136	202	411	0	9728
Sudan	2016	7	623	0	341	27	0	0	0	998
Sudan	2017	16	724	0	573	48	0	0	0	1361

Tabel 2: Jumlah Senjata yang Disita di Kenya dan Sudan (2016-2017)

Sumber: UNODC Global Study on Firearms Trafficking 2020 (https://www.unodc.org

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Laporan Small Arms Survey mengidentifikasi bahwa perdagangan lintas batas melalui darat adalah jenis jalur senjata ilegal yang paling menonjol di seluruh Afrika (Florquin et al, 2019). Namun, untuk Tanduk Afrika, rute maritim sangat penting mengingat geografisnya dan pentingnya strategis Laut Merah/Teluk Aden (Conflict Armament Research,2016). Peningkatan ancaman keamanan di Laut Merah dan Teluk Aden sejak terbentuknya kolaborasi yang berkembang antara Al Shabaab dan Houthid. Keduanya memanfaatkan kontrol teritorial mereka dan jaringan penyelundupan untuk melancarkan serangan dan mengganggu lalu lintas maritim semakin memperumit keamanan maritim dan berpotensi memengaruhi upaya interdiksi senjata (ACSS, 2025).

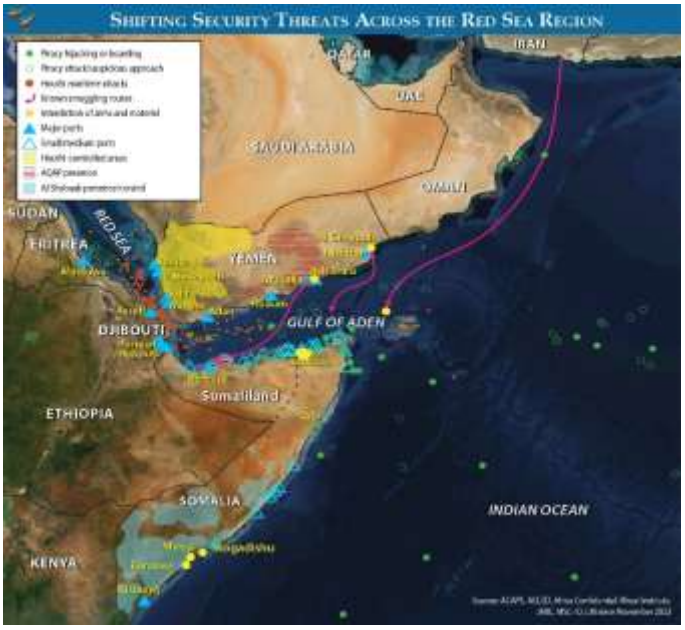

Gambar 2. Peta Perubahan Ancaman Keamanan di kawasan Laut Merah (Source: https://africacenter.org/)

Kawasan Tanduk Afrika berfungsi sebagai penghubung bagi perdagangan senjata transnasional dan ekonomi ilegal lainnya. Maka dari itu, pentingnya strategis interdiksi maritim dan krisis Laut Merah tidak dapat diabaikan(Florquin et al, 2019).

Analisis Dampak Jaringan Transnasional Senjata Ilegal terhadap Keamanan Manusia di Kawasan Tanduk Afrika

Jaringan transnasional penyelundupan senjata ilegal di Kawasan Tanduk Afrika menciptakan *feedback loop* kerentanan yang saling memperkuat pada ketujuh dimensi keamanan manusia UNDP (1994). **Pertama,** Arus persistensi Small Arms and Light Weapons (SALW) dan sistem persenjataan canggih—seperti rudal anti-tank dan attack drones—meningkatkan *lethality* konflik. ACLED (2023) mencatat 104 insiden kekerasan politik di perbatasan Kenya–Somalia pada kuartal III 2023, dengan lebih dari 400 korban jiwa, menciptakan "iklim teror" yang merusak rasa aman individu dan kohesi sosial. Ketersediaan senjata memicu eskalasi razia ternak di Karamoja Cluster hingga 40% sejak 2021, menghancurkan mekanisme resolusi sengketa tradisional dan memicu migrasi paksa antarkomunitas (Florquin et al, 2019). **Kedua,** Senjata ilegal membentuk fondasi *war economy*, di mana milisi dan pialang senjata memperoleh pendapatan dari penjualan dan pemerasan. UNDP memperkirakan kerugian output agrikultur Sudan–Ethiopia senilai US$2,5 miliar pada 2022–2024 akibat konflik bersenjata, memperparah pengangguran dan kelaparan (UNDP, 2024. Dalam laporan lain, 67,4 juta orang menghadapi food insecurity akut pada awal 2025,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 12, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

terpicu oleh gangguan rute distribusi pangan akibat patroli milisi dan serangan target bantuan kemanusiaan (Xinhua, 2025). **Ketiga,** Senjata berat menarget instalasi pengelolaan air, bendungan, dan rumah sakit, penurunan kesuburan tanah hingga 20% di Darfur akibat perusakan irigasi(UNEP & INTERPOL 2016). Disisi lain peningkatan 15% angka kematian ibu dan bayi di South Sudan setelah fasilitas kesehatan dikepung milisi(Yeboua & Cilliers, 2023). Jutaan pengungsi internal hidup di kamp tanpa sanitasi memadai, memicu penyakit yang lebih parah.

Dimensi Keamanan Manusia	Dampak Jaringan Senjata Ilegal
Keamanan Personal & Komunitas	Memicu lonjakan insiden kekerasan akut dan merusak kohesi sosial, menciptakan "iklim teror".
Keamanan Ekonomi & Pangan	Merusak infrastruktur agrikultur, mengganggu rantai distribusi pangan, dan menyebabkan lonjakan kerawanan pangan.
Keamanan Kesehatan & Lingkungan	Memicu wabah penyakit di kamp pengungsian massal dan menurunkan produktivitas lahan akibat serangan pada infrastruktur air.

Tabel.3 Dampak Jaringan Transnasional Senjata Ilegal terhadap Keamanan Manusia di Kawasan Tanduk Afrika

Berdasarkan analisis terhadap fenomena jaringan transnasional senjata ilegal di Kawasan Tanduk Afrika, dapat dikatan bahwa krisis keamanan manusia yang terjadi merupakan manifestasi dari **kegagalan sistemik dalam menjamin tiga kebebasan fundamental** yang menjadi inti konsep human security: freedom from fear, freedom from want, dan freedom to live in dignity. Jaringan senjata ilegal tidak hanya menjadi ancaman isolatif, tetapi menciptakan **efek domino yang mengikis tujuh dimensi keamanan manusia secara simultan**.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa jaringan transnasional senjata ilegal di Kawasan Tanduk Afrika telah menciptakan krisis keamanan manusia (human security) multidimensional. Proliferasi senjata illegal memperkuat kelompok ekstremis seperti al-Shabaab dan Islamic State Somalia, sehingga memicu eskalasi kekerasan, pengungsian massal, dan kerusakan infrastruktur. Dampaknya meliputi tujuh dimensi keamanan manusia UNDP: ancaman langsung terhadap keamanan personal dan komunitas (pembunuhan, kekerasan antaretnis), keruntuhan keamanan ekonomi dan pangan (kerugian agrikultur signifikan, jutaan orang rawan pangan), serta degradasi keamanan kesehatan dan lingkungan (wabah penyakit, penurunan kesuburan tanah). Kegagalan kerangka regional seperti Nairobi Protocol dan Bamako Declaration dalam mengontrol aliran senjata memperparah siklus konflik. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi keterkaitan antara penyelundupan senjata ilegal dengan pasar gelap komoditas lain (misal: narkotika, perdagangan manusia), serta menganalisis dampak jangka panjang terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan regional (misal: DDR, program reintegrasi, serta adaptasi iklim berbasis komunitas) dalam menurunkan permintaan senjata ilegal dan memperkuat ketahanan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, terukur, dan aplikatif bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

ACSS. (2025, May 30). *Expanding Al Shabaab-Houthi Ties Escalate Security Threats to Red Sea Region - Africa Center*. Africa Center for Strategic Studies. https://africacenter.org/spotlight/al-shabaab-houthi-security-red-sea/

ADF. (2023, February 28). *ISS Report: Iran Funnels Weapons that Arm Horn of Africa Extremist Groups*. Africa Defense Forum - Africa Defense Forum; Africa Defense Forum. https://adf-magazine.com/2023/02/iss-report-iran-funnels-weapons-that-arm-horn-of-africa-extremist-groups/

Africa Center for Strategic Studies. (2017). *The Illicit Superhighway: Transnational Organized Crime in Afric*. https://africacenter.org/spotlight/the-illicit-superhighway-transnational-organized-crime-in-africa/

Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khdhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, *6*, 100198. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198

Aidi, H. (2020). *Geo-Politics in the Horn of Africa*. www.policycenter.ma

Alam, M. S., & Asmawi, A. (2024). Qualitative research: Defining features and guiding principles. *Forum for Education Studies*, *2024*(2), 1262. https://doi.org/10.59400/fes.v2i2.126

Alketbi, E. (2024). *featured Horn of Africa's New Security Landscape: Geopolitical Consequences of the Conflict-Cooperation Dynamics*.

Aning, K., & Lartey, E. A. (2019). Governance perspectives of human security in Africa. *Asian Journal of Peacebuilding*, *7*(2 Special Issue), 219–237. https://doi.org/10.18588/201911.00a095

Bile, A. M. (2024). The Challenges of Human Security in the Horn of Africa: The Case of Somaliland. In *International Journal of Conflict Management* (Vol. 5, Issue 1). www.carijournals.orgwww.carijournals.orgwww.carijournals.org

Burhanuddin, A. (2017). *Studi keamanan dan isu-isu strategis global*. Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Hasanuddin.

Conflict Armament Research. (2016). *MARITIME INTERDICTIONS OF WEAPON SUPPLIES TO SOMALIA AND YEMEN*. www.combinedmaritimeforces.com

Dubale, A. (2024a). The Geopolitics of the Horn of Africa: Navigating Regional Conflicts and Global Interests. *International and Public Affairs*, *8*(2), 27–31. https://doi.org/10.11648/j.ipa.20240802.12

Florquin, N., Lipott, S., & Wairagu, F. (2019). *WEAPONS COMPASS Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa*. www.smallarmssurvey.org.

Gebremichael, M. (2019). *Geopolitical Dynamics in the Horn of Africa and Mechanisms for Collaboration between NATO and IGAD Countries*. www.TheSouthernHub.org

Gobena, M. A. (2020). *Transnational Organized Crime and Peacebuilding in East Africa*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17568.20485

Human Right Watch. (2025, January 16). *East Africa, Horn: Civilian Suffering in Armed Conflict*. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2025/01/16/east-africa-horn-civilian-suffering-armed-conflict

Hidayat, R. A. (2017). Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. *Intermestic: Journal of International Studies*, *1*(2), 108. https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3

Munene, M. (2023). The Horn of Africa in 2023 A Geopolitical Analysis. *The HORN Bulletin*, *VI*(I).

Singh, J. (2016). Human security: A theoretical analysis. In *Political Science and Art* (Vol. 4, Issue 3). https://primescholarslibrary.org/

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Solomon, N., Birhane, E., Gordon, C., Haile, M., Taheri, F., Azadi, H., & Scheffran, J. (2018). Environmental impacts and causes of conflict in the Horn of Africa: A review. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 177, pp. 284–290). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.11.016

Tabar, M. M., Hafeznia, M. R., Safavi, S. Y., & Azami, H. (2021). Geopolitical Expounding of Africa's Conflicts since the End of Cold War (Case Study: The States Located between 0 to 15th Parallel North). *Journal of World Sociopolitical Studies*, *5*(3), 603–658. https://doi.org/10.22059/wsps.2022.331134.1240

United Nations Office on Drugs and Crime . (2022, August 20). *Transnational Organized Crime Programme*. Www.unodc.org. https://www.unodc.org/easternafrica/en/what-we-do/transnational-organized-crime/index.html

UNDP. (2024). Joint regional analysis: Key trends in the Horn. United Nations Development Programme.

UNEP & INTERPOL. (2016). The rise of environmental crime: A growing threat to natural resources, peace, development and security. UNEP–INTERPOL

Willima, D., & Ramachela, T. J. (2023, February 7). *An ocean of weapons: arms smuggling to Somalia*. Institute for Security Studies. https://issafrica.org/iss-today/an-ocean-of-weapons-arms-smuggling-to-somalia

Xinhua. (2025, January 31). Over 67 mln people food insecure in Horn of Africa as climate shocks, conflict rise: report. Xinhuanet

Yeboua, K., & Cilliers, J. (2023). *Development prospects for the Horn of Africa to 2040: Health* [Special Report]. African Futures & Innovation Programme.

Zabyelina, Y. (2009). *Transnational Organized Crime in International Relations*.